

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan sebagai salah-satu solusi pengaturan anak angkat yang memiliki berbagai permasalahan. Fokus kajian dalam penelitian ini ialah; 1) Kebenaran penetapan pengadilan agama sebagai syarat pengangkatan anak dalam Kompilasi Hukum Islam dapat dibenarkan menurut Hukum Islam; 2) Landasan filosofis pengaturan wasiat wajibah bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan masalah berupa pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan sumber bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Keseluruhan bahan hukum tersebut dianalisis dengan metode analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pengaturan penetapan pengangkatan anak oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan hukum Islam, hal ini disebabkan oleh pengangkatan anak tersebut merupakan hasil kesepakatan ulama' yang tertuang dalam KHI dan keberlakuannya memiliki kesamaan dengan ijma' dalam tradisi Hukum Islam. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pengaturan penetapan wasiat wajibah harus dilakukan secara kasuistik sesuai tingkat kesejahteraan anak angkat.

Kata Kunci : Anak Angkat, KHI, Wasiat Wajibah, dan Penetapan.

ABSTRACT

This research was conducted as a one of setting solutions adopted children who have various problems. The focus of study in this research is; 1) the truth of the religious court decree as a condition of adoption in the Compilation of Islamic Law in Indonesia (KHI) can be justified according to Islamic Law; 2) The philosophical ground setting was "wasiat wajibah" for adopted children in the Compilation of Islamic Law.

This study uses normative legal research methods to approach the problem of a conceptual approach, the comparative approach, and statute approach. While the source of legal materi used consisted of primary legal materi, secondary law materi, and tertiary legal materi. Overall legal materi were analyzed using qualitative methods juridical analysis.

The results of this study explained that the arrangement determination adoption by the religious court does not conflict with Islamic law, this is caused by the removal of the child as the result of an agreement ulama' contained in KHI and validity have in common with the "ijma'" in the tradition of Islamic law. The study also concluded that the fixing arrangement was borrowed must be done according to the level of child welfare by case lift.

Keywords: *Adopted Children, KHI, wasiat wajibah, and decree.*